

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim & M. Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Baldric Siregar. 2015. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Kebijakan Akuntansi Transfer*. [Online]. Tersedia : <https://peraturan.bpk.go.id>. Diakses pada tanggal 08 Juli 2023.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2022. *Statistik Keuangan 2020 – 2021 Pemerintah Kabupaten/Kota*. Semarang : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2022. *Statistik Keuangan 2020 – 2021 Pemerintah Kabupaten/Kota*. Semarang : Badan Pusat Statistik.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2011. *Deskripsi dan Analisis APBD 2011*. Jakarta : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. [Online]. Tersedia : [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id). (diakses tanggal 17 Oktober 2022).
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. 2021. *Dana Bagi Hasil*. [Online]. Tersedia : <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2022.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. 2021. *Konsep Dasar Pinjaman Daerah*. [Online]. Tersedia : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?page\\_id=328](https://djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=328). Diakses pada tanggal 09 Juli 2023.
- Djaenuri, Aries (2012). *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Jakarta: Indonesia Ghalia.
- Djaenuri, H.M Aries. 2014. *Hubungan Keuangan Pusat – Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Febriyanti, Faris. 2019. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 – 2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*. 4(2). Hal 162 – 175.

- Ghozali, I. 2021. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Jensen, M., C., dan W. Meckling. 1976. *Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure*. *Journal of Finance Economic*. 3:305-360, di-download dari <http://www.nhh.no/for/courses/spring/eco420/jensenmeckling-76.pdf>.
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kadir, Abdul 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Perspektif Otonomi Di Indonesia*. Medan: Fisip USU Press.
- Mehta, C. R., & Patel, N. R. (2012). *IBM SPSS Exact Tests*. 1–236.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta. STIE YKPN.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit UII Pre.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Marselina, Herianti. 2022. Determinan Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Governance* 2(2). Hal 110 – 118.
- Martono, Nanang. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Marzuki, dkk. 2022. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

- Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017. *Jurnal visioner dan strategis*. 11(1). Hal 81 - 91.
- Musfirati, Sugiyanto. 2021. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Keistimewaan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Substansi*. 5(1). Hal 20 – 36.
- Poerwadarminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Rahmayani, Kurniadi. 2022. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2018 – 2021. *Jurnal Akuntansi Kompetitif*. 5(2). Hal 224 – 234.
- Riyadi. 2022. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. 3(1). Hal 298 – 314.
- Siahaan, MARIHOT P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sidik, Machfud. 2007. *A New Perspective of Intergovernmental Fiscal Relations: Lessons From Indonesia's Experience*. Jakarta: Ripelge Jakarta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet.
- Suhadak dan Trilaksono Nugroho. 2007. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Sulaiman, dkk. 2021. Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Akuntanika*. 7(2). Hal 111-128.
- Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zuraida, Ida. 2013. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Peraturan Terkait**

\_\_\_\_\_. 2004. Undang - Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

\_\_\_\_\_. 1999. Undang - Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

\_\_\_\_\_. 2014. Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

\_\_\_\_\_. 2004. Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

\_\_\_\_\_. 2000. Undang - Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang *Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

\_\_\_\_\_. 2005. Undang - Undang No. 55 Tahun 2005 Tentang *Dana Perimbangan*.

\_\_\_\_\_. 2004. Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*.